

TAHUN 2015  
BARAT KECAMATAN KINALI  
PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN



TAHUN 2014  
NAGARI KINALI  
(LKPJ)  
LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah SWT, kita masih dapat limpahan Rahmad dan karuniaNya sehingga Kita dapat membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2014.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kinali ini adalah Laporan Kegiatan Wali Nagari Kinali pada Tahun pertama dalam masa bakti enam tahun, Laporan ini meliputi Kebijakan umum Pengelolaan Keuangan Nagari, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nagari, Penyelenggaraan Tugas Perbantuan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lainnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nagari yang dilandasi oleh Peraturan Nagari No : 01 tahun 2014 yang memuat tentang Program Kerja Tahun 2014. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kegiatan Wali Nagari disusun berdasarkan Program Kerja Tahun 2014 dan APB Nagari Tahun 2014, sebagai berikut :

1. Kebijakan umum Pengelolaan Keuangan Nagari
  - a. Pengelolaan Pendapatan Nagari
  - b. Pengelolaan Belanja Nagari
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nagari.
  - a. Urusan Hak Asal - Usul Nagari.
  - b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten.
3. Penyelenggaraan Tugas Perbantuan.
  - a. Tugas Perbantuan yang diterima.
  - b. Tugas Perbantuan Yang diberikan.
4. Penutup.

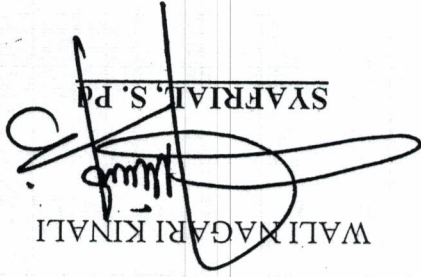
Kami sadari bahwa Laporan ini masih terdapat kelemahan untuk itu kami minta kepada Pimpinan Beserta anggota Badan Musyawarah Nagari kinali untuk dapat memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Nagari untuk masa yang akan datang.

Demikianlah Laporan ini disusun, disajikan dan disampaikan untuk dapat dimaklumi adanya.

Durian Kilangan, 10 April 2015

WALINAGARI KINALI

SYAARRIAL, S. Pd



# DAFTAR ISI

i	KATA PENGANTAR.....	i
ii	DAFTAR ISI.....	ii
1	BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1	A. DASAR HUKUM.....	1
2	B. GAMBARAN UMUM NAGARI.....	2
2	1. KONDISI GEOGRAFIS.....	2
3	2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.....	3
3	3. KONDISI EKONOMI.....	3
3	a. Potensi unggulan Nagari.....	3
5	b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.....	5
6	BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI.....	6
6	A. VISI DAN MISI.....	6
6	B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN NAGARI (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH NAGARI).....	6
7	C. PRIORITAS NAGARI.....	7
9	BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI.....	9
9	A. PENGELOLAAN PENDAPATAN NAGARI.....	9
9	1. Intensifikasi dan Eksstensifikasi.....	9
10	2. Target dan realisasi Pendapatan.....	10
16	3. Permasalahan dan penyelesaian.....	16
17	B. PENGELOLAAN BELANJA NAGARI.....	17
17	1. Kebijakan Umum Keuangan Nagari.....	17
17	2. Target dan realisasi Belanja.....	17
18	3. Permasalahan dan penyelesaian.....	18
19	BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI.....	19
19	A. URUSAN HAK ASAL USUL NAGARI.....	19
19	1. Program dan Kegiatan.....	19
22	2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....	22

24	3. Permasalahan dan penyelesaian.....
	B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
24	...../KOTA.....
24	1. Program dan Kegiatan.....
24	2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....
24	3. Permasalahan dan penyelesaian.....
26	BAB V : PENYEENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....
26	A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.....
26	1. Dasar Hukum.....
26	2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....
26	3. Satuan Kerja Perangkat Nagari.....
26	4. Kegiatan yang diterima.....
26	5. Sumber dan Jumlah Anggaran.....
27	6. Permasalahan dan penyelesaian.....
27	B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.....
27	1. Dasar Hukum.....
27	2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan.....
28	3. Sumber dan Jumlah Anggaran.....
28	4. Sarana dan Prsarana.....
28	PENUTUP.....

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi, Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;

## PENDAHULUAN

## BAB I

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Perubahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

17. Peraturan Nagari Kinalli Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Kinalli Tahun 2014;

18. Peraturan Nagari Kinalli Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Kinalli Tahun 2014;

## B. GAMBAR UMUM

### 1. KONDISI GEOGRAFIS

- Ketinggian dari permukaan laut +46 M
- Letak Geografis  $00^{\circ}03'LU - 00^{\circ}11'LS$  dan  $99^{\circ}45'BT - 99^{\circ}03'BT$

Luas Wilayah Nagari Kinalli 365,57 Km2 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nagari koto baru kecamatan Luhak Nan Duo.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tigo Nagari, dan Kabupaten Agam.
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tigo Nagari kabupaten Pasaman
- Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Katagan/Mandianganin.

## 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk Nagari Kinali berdasarkan Laporan petugas Registrasi kependudukan Nagari Kinali tahun 2014

### MUTASI PENDUDUK MENURUT NAGARI

Nagari / Jorong	Lahir		Mati		Datang		Pindah	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Nagari Kinali	1436	358	217	315				

### PENDUDUK PER JENIS KELAMIN

Nagari / Jorong	Penduduk		Sex Ratio	
	L	P	L+P	
Nagari Kinali	30.13	33.25	63.38	99

Jumlah Penduduk 63.389 jiwa Laki-laki 30.138 jiwa perempuan 33.251 jiwa.

### LUAS JORONG, BANYAKNYA RUMAH TANGGA DAN PENDUDUK PER NAGARI / JORONG

Nagari	Luas (Km <sup>2</sup> )	RT	Pendd	Rata-rata Pendd	
				KM <sup>2</sup>	RT
Nagari Kinali	365,57	15.057	63.389	172	5

Luas Wilayah administrasi Nagari Kinali 365,57 Km<sup>2</sup>.

Jumlah Kepala Keluarga/RumahTangga 15.057 KK.

Jumlah Penduduk 63.389 jiwa.

Kepadatan Penduduk rata-rata 172 jiwa per kilometer persegi.

Rata-rata jumlah penduduk per Kepala Keluarga/RumahTangga 5 jiwa per KK

## 3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Nagari

1) Perkebunan

Mayoritas wilayah nagari kinali didominasi oleh perkebunan sawit swasta, BUMN dan perkebunan sawit rakyat.Dinamika

Mayoritas wilayah nagari kinali didominasi oleh perkebunan sawit swasta, BUMN dan perkebunan sawit rakyat. Dinamika perkembangan Perkebunan Sawit di Nagari Kinali cukup maju pesat sehingga hal ini berdampak kepada :

- i. Meningkatkan Pertumbuhan Perkapita Anak Nagari Kinali dari tahun ketahun, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Anak Nagari hal ini sangat berpengaruh terhadap factor-faktor lainnya.
  - ii. Nagari Kinali merupakan salah satu barometer perdagangan sawit di daerah Pasaman Barat Khusus nya dan sekitarnya. Hal ini didukung oleh3 Perusahaan Pabrik Sawit.
  - iii. Hal ini secara langsung juga telah menambah lapangan pekerjaan baik disektor perkebunan dan juga industri.
  - iv. Dampak Pertumbuhan sector perdagangan juga kuat di daerah industry, hal ini dibuktikan dengan arus transportasi yang semakin padat oleh hasil industry contohnya : CPO, Karnel, cangkang sawit dan juga limbah pabrik lainnya.
  - v. Dampak Pertumbuhan sector Pendidikan juga semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan hasil Wisudawan SI & SII semakin banyak.
- Diharapkan dengan peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia di Nagari Kinali Kedepan akan terwujudlah VISI dan MISI Nagari Kinali.

2) Pertanian hortikultura

- i. Jagung juga merupakan Produk Unggulan, hal ini juga sangat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya Petani jagung, dan juga telah banyak membuka lapangan pekerjaan baru misalnya :agen jagung yang juga mempekerjakan beberapa karyawan.
- ii. Produksi jagung pada saat ini masih dipergunakan sebagian besar untuk bahan dasar pakan ternak yang diproduksi di beberapa kota/kabupaten disekitar Nagari Kinali misalnya di Kota Padang, Kota Payakumbuh dan hanya sebagian kecil diproduksi didalam Nagari Kinali.

Pariwisata

Di Nagari Kinali ada beberapa objek Wisata unggulan namun hal ini belum dikelola secara profesional karena investor belum ada yang tertarik dengan potensi dimaksud diantaranya:

- Muaro Binguang di ampek Koto
- Objek Wisata Islam Ilikan Larangan Silambau
- Batu Balipek di Kampung Kurai
- Pemandian Mata air di air meruap
- Air terjun Siburai-burai di durian Tibarau
- Air terjun Siburai-burai di durian Kandang.



- Tabek Gadang Banchah Sopan Air Meruap.

#### Keagamaan

Nagari Kinali juga merupakan salah satu daerah yang kuat dengan aliran Tasawuf, ini dibuktikan dengan masih kuatnya aliran Tharikat Nagasabandiah yang berkembang, yang berpusat di Durian Tibarau Nagari Kinali, Syech Mudo Abdurrahman adalah seorang ulama yang menyebarkan Tasawuf ini di daerah Nagari Kinali dan sekitarnya. Bahkan sampai saat ini diperkuat dengan berdirinya beberapa surat hari kata oleh khalifah dan Tuaniku sebagai wujud dan kependulian terhadap perkembangan Tharikat di Nagari Kinali dan Sekitarnya.

#### b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Perekonomian dinagari kinali didukung oleh beberapa faktor perekonomian, sesuai dengan kondisi wilayah nagari kinali :

#### 3) DII

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

### BAB II

#### A. VISI DAN MISI

##### 1. VISI Nagari

“ MEMBANGUN KINALI BERBASIS PENDIDIKAN  
BERLANDASKAN ADAT DAN SYARAK ”

##### 2. MISI Nagari

- a) Memberikan Pelayanan secara adil dan merata
- b) Mengentaskan Buta Huruf
- c) Meningkatkan kualitas Iman dan Tagwa
- d) Melestarikan Adat dan Budaya, bekerjasama dengan Nimik Mamak, tokoh Adat dan tokoh Budaya.

Adapun Makna dari Misi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Membangun system dan struktur pendidikan yang sejajar dengan standar Nasional serta sesuai dengan kondisi kebutuhan nagari serta membangun system pelayanan yang cepat, tepat, tanggap dan dapat menjangkau seluruh pelosok daerah

2. Membangun manajemen Pemerintahan yang profesional sesuai prinsip pemerintahan yang baik ( good governance ).

3. Membangun dan mengembangkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan antara semua komponen baik itu aparatut pemerintahan Nagari, masyarakat dan perantau

4. Membangun struktur ekonomi yang kuat danberimbang dengan memunculkan empat wilayah pertumbuhan ekonomi dengan orientasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber penghasilan masyarakat yang produktif, lestari dan berkesinambungan.

5. Membangun kondisi social budaya masyarakat Nagari yang maju dan adaptif dijiwai falsafah Adat Basandi Syara, Syara' basandi Kitabullah. Dan peran aktif dari kelembagaan adat tali tigo sampilin dan tungku tigo sajarangan.

#### B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN NAGARI

##### 1. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi dan misi adalah:

1. Menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan dan tidak semata-mata menjadi objek pembangunan.

2. Meningkatkan , pelaksanaan , pengendalian dan pemeliharaan pembangunan.

3. Meningkatkan daya dan kemampuan masyarakat Nagari untuk dapat berusaha sesuai dengan keterampilan dan dukungan potensi Nagari.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang profesional sebagai pelayanan masyarakat dan bukan sebagai penguasa.
5. Meningkatkan pemahaman hukum formal dan hukum adat sehingga tercipta masyarakat Nagari yang bermartabat dan sadar hukum
6. Memanfaatkan momentum otonomi daerah untuk dapat menggalang segala potensi sumber daya alam Nagari secara efektif, efisien dan lestari serta meningkatkan pelayanan umum masyarakat yang cepat, tanggap dan berkeadilan.
7. Meningkatkan pendidikan yang berbasis agama/ aqidah

## 2. ARAH KEBIJAKAN NAGARI.

### a) Arah Kebijakan Keuangan Nagari.

Kebijakan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Nagari Kinali periode tahun 2015 – 2020 adalah :

1. Meningkatkan manajemen Pemerintahan Nagari
2. Pelaksanaan pembangunan dengan pola pemberdayaan dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan restrukturisasi manajemen Pemerintahan Nagari.
3. Reorientasi dan restrukturisasi manajemen pendidikan serta rekayasa social dan pengayaan budaya masyarakat.
4. Restrukturisasi perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan wilayah pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan penyehatan lingkungan.
5. Nilai-nilai agama menjiwa dan mewarnai setiap prilaku dan sikap hidup masyarakat Nagari di setiap bidang kehidupan.

### b). Prioritas Nagari

Skala Prioritas yang telah dilaksanakan berdasarkan musrembang tahunan dengan sumber dana APBN, APBD. PROVINSI SUMATERA BARAT, APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT, PNPM MANDIRI, ALOKASI DANA NAGARI.

Pada dasarnya :

1. Dibidang Pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur Nagari.
2. Dibidang Kesehatan Pemerintah Nagari juga memprioritaskan Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan, dan juga program Penyuluhan Kesehatan, Posyandu serta lansia.
3. Dibidang Pendidikan Pemerintahan Nagari melaksanakan Sertifikasi Baca tulis Alquran bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

4. Dibiidang Energi diprioritaskan pada Pembangunan PLTMH, dibidang pertambangan diprioritaskan pada pengawasan terhadap pengelolaan galian c.
5. Bidang Sosial budaya diprioritaskan kepada Pembinaan Kesenian Tradisional.
6. Bidang Ketertiban dan Keamanan diprioritaskan pada Pembangunan Sistem Keamanan Masyarakat (Siskamling).
7. Bidang Keagamaan diprioritaskan pada Penyuluhan oleh Da'I Nagari.

# KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

## BAB III

### A. PENGELOLAAN PENDAPATAN NAGARI

#### 1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi

##### a. Intensifikasi

Intensifikasi diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Nagari untuk meningkatkan Pendapatan Nagari dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti.

Terdapat beberapa indikator yang membentuk variabel ini yaitu:

1. Memperluas basis Pendapatan, dengan item-item yang membentuknya meliputi:
  - a) Mengidentifikasi Sektor, Jenis dan potensial Pendapatan Nagari.
  - b) Memperbaiki basis data Pendapatan, penilaian
  - c) Menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Memperkuat proses pemungutan dengan item item yang membentuknya meliputi:

2. Meningkatkan pengawasan dengan item-item yang membentuknya meliputi:
  - a) Mempercepat penyusunan Peraturan Nagari,
  - b) Mengubah tarif pendapatan nagari dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan efisiensi
    - a) Pemeriksaan secara dadakan dan berkala,
    - b) Memperbaiki proses pengawasan,
- meliputi:
- a) memperbaiki prosedur administrasi pendapatan nagari dan penyederhanaan administrasi pendapatan nagari.
  - b) meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

4. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan item yang membentuknya meliputi:
    - a) memperbaiki koordinasi dengan instansi terkait di Nagari dan Pemerintah daerah.
- antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Memperluas basis penerimaan
- b) Memperkuat proses pemungutan
- c) Meningkatkan pengawasan
- d) Meningkatkan efisiensi administrasi

##### b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan Nagari yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari Sumber daya alam dan Aset Kekayaan Nagari, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Daerah dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, yakni pungutan pendapatan asli nagari yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan nagari berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiscal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Hal ini merupakan suatu ikatan yang perlu dijalin antara nagari dengan anak nagari akan pentingnya peran aktif anak nagari dalam mewujudkan Pembangunan yang

sinambungan dan berkesinambungan. Ekstensifikasi pendapatan Nagari merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Nagari dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli nagari.

❖ Bagaimana Kerjasama Nagari dengan pihak perusahaan industry ?

❖ Mampukah Peraturan Nagari menjadi dasar hukum terhadap hasil produk perusahaan industry sebagai wujud investasikan kepada anak nagari dalam peranserta aktif pembangunan nagari ?

❖ Dalam Hal Perbankan, sudah efektifkah system kredit ditengah ekonomi global saat ini terhadap pertumbuhan perkapita anak nagari ?

Kebijakan-kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor local maupun investor asing untuk menanamkan/ menginvestasikan modalnya di Nagari.
- b. Memberi kemudahan bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di daerah dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit.
- c. Keseimbangan Pembangunan yang selaras dengan Sistem Adat, Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Ideologi ini lah yang menjadi Landasan Idiel dalam kehidupan Anak Nagari. Alam Takambang Jadi guru.
- d. Memprioritaskan investor local untuk menginvestasikan modalnya di Nagari.

## 2. Target dan Realisasi Pendapatan

Lampiran : Peraturan Nagari Kinalli

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2014

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.	PENDAPATAN	2,093,950,000	1,960,770,293	(133,179,707)
1.1.	Pendapatan Asli Nagari	386,950,000	193,700,000	(193,250,000)
1.1.1.	Hasil Usaha Nagari	6,000,000	6,000,000	-
1.1.1.1.	Hasil Usaha Pemerintah Nagari	6,000,000	6,000,000	-
1.1.1.2.	Bagi Hasil Koperasi Nagari th 2013	6,000,000	6,000,000	-
1.	PENDAPATAN	2,093,950,000	1,960,770,293	(133,179,707)
1.1.2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Nagari	20,000,000	-	(20,000,000)
1.1.2.1.	Tanah Kas Nagari	10,000,000	-	(10,000,000)
1.1.2.1.1.	Sewa Tanah Kas Nagari	10,000,000	-	(10,000,000)
1.1.2.2.	Pasar Nagari	10,000,000	-	(10,000,000)
1.1.2.2.1.	Bagi Hasil Pendapatan Pasar Nagari	10,000,000	-	(10,000,000)
1.1.3.	Hasil Swadaya dan Partisipasi	150,000,000	60,000,000	(90,000,000)

1.3.1	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	150,000,000	60,000,000	(90,000,000)
1.3.1.1	Iuran Nagari	150,000,000	60,000,000	(90,000,000)
1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah	210,950,000	127,700,000	(83,250,000)
1.5.1	Lain-lain Pendapatan Asli Pemerintah Nagari yang sah	210,950,000	127,700,000	(83,250,000)
1.5.1.1	Jasa Registrasi Pelayanan Administrasi	210,950,000	127,700,000	(83,250,000)
1.2	Bagi Hasil Pajak	-	52,522,162	52,522,162
1.2.1	Bagi Hasil Pajak	-	52,522,162	52,522,162
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	52,522,162	52,522,162
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	5,565,251	5,565,251
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi	-	5,565,251	5,565,251
1.3.1.1	Bagi Hasil Retribusi Daerah	-	5,565,251	5,565,251
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten, dan Nagari lainnya	1,707,000,000	1,708,982,880	1,982,880
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	12,000,000	13,982,880	1,982,880
1.5.1.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	12,000,000	13,982,880	1,982,880
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1,695,000,000	1,695,000,000	-
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	1,695,000,000	1,695,000,000	-
1.5.2.1.1	Alokasi Dana Nagari	1,440,000,000	1,440,000,000	-
1.5.2.1.2	Bantuan Pilwaha Nagari Kinah	-	-	-
1.5.2.1.3	Alokasi Dana Nagari Khusus	255,000,000	255,000,000	-
2	BELANJA	2,264,770,596	2,131,590,889	(133,179,707)
2.1	Belanja Langsung	551,252,293	540,952,293	(10,300,000)
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	25,800,000	40,321,852	14,521,852
2.1.1.1	Honor Tim/Panitia	25,800,000	40,321,852	14,521,852
2.1.1.1.1	Honor PTPKN	23,400,000	23,400,000	-
2.1.1.1.2	Honor Sidang Paripurna	2,400,000	2,400,000	-
2.1.1.3	Pajak dan Retribusi	14,521,852	14,521,852	-

2.1.2	Belanja Barang/Jasa	156,402,293	153,230,441	(3,171,852)
2.1.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis	10,789,000	24,990,857	14,201,857
2.1.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor	8,989,000	23,510,857	14,521,857
2.1.2.1.2	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1,200,000	1,200,000	-
2.1.2.1.3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600,000	280,000	(320,000)
2.1.2.2	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,835,000	6,625,000	(8,210,000)
2.1.2.2.1	Belanja Cetak	7,500,000	3,000,000	(4,500,000)
2.1.2.2.2	Belanja Penggandaan	7,335,000	3,625,000	(3,710,000)
2.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	19,100,000	12,550,000	(6,550,000)
2.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Kantor	13,500,000	11,500,000	(2,000,000)
2.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	4,900,000	1,050,000	(3,850,000)
2.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700,000	-	(700,000)
2.1.2.4	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut lainnya	23,300,000	15,300,000	(8,000,000)
2.1.2.4.1	Belanja Pakaian Dinas Harian	13,200,000	13,200,000	-
2.1.2.4.2	Belanja Pakaian Hari Tertentu lainnya	10,100,000	2,100,000	(8,000,000)
2.1.2.5	Belanja Pakaian Olah raga	6,900,000	2,100,000	(4,800,000)
2.1.2.5.1	Belanja Pakaian Muslim/daerah	3,200,000	-	-
2.1.2.5	Belanja Jasa Kantor	10,400,000	7,282,880	(3,117,120)
2.1.2.5.1	Belanja Jasa Listrik	8,400,000	4,800,000	(3,600,000)
2.1.2.5.3	Belanja Jasa Publikasi	2,000,000	500,000	(1,500,000)
2.1.2.5.4	Belanja Jasa Kesehatan	2,000,000	500,000	(1,500,000)
2.1.2.6	Belanja Jasa Kesehatan Belanja Jasa Ketenagakerjaan	1,982,880	1,100,880	(882,000)
2.1.2.6.2	Belanja Jasa Transportasi dan Retribusi	1,500,000	14,521,852	13,021,852
2.1.2.7	Belanja Jasa Transportasi	1,500,000	14,521,852	13,021,852
2.1.2.7.1	Belanja Jasa Transportasi Makan/minum Rapat	7,936,000	4,326,000	(3,610,000)



		5,936,000	3,826,000	(2,110,000)
2.1.2.7.2	Belanja Makan/minum Tamu	2,000,000	500,000	(1,500,000)
2.1.2.8	Belanja Perjalanan Dinas	68,542,293	67,633,852	(908,441)
2.1.2.8.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,270,000	10,130,000	(5,140,000)
2.1.2.8.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,200,000	5,000,000	(6,200,000)
2.1.2.8.3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	42,072,293	37,982,000	(4,090,293)
2.1.2.8.4	Perjalanan Dinas Retribusi Pemungut Pajak dan Retribusi Pemungut Pajak	14,521,852		
2.1.3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	255,000,000	255,000,000	-
2.1.3.3.1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	255,000,000	255,000,000	-
2.1.3.4	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,900,000	46,400,000	(2,500,000)
2.1.3.4.2	Belanja Modal Mobiler Kantor	23,800,000	23,800,000	-
2.1.3.4.3	Belanja Modal Peralatan Kantor	22,600,000	22,600,000	-
2.1.3.4.4	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	2,500,000	-	(2,500,000)
2.1.3.5	Belanja Pembangunan Kantor	65,150,000	46,000,000	(19,150,000)
2.1.3.5.3	Belanja Modal Rehab Kantor Wali Nagari	64,150,000	45,000,000	(19,150,000)
2.1.3.5.4	Belanja Modal Pembangunan Plang Merek Kantor	1,000,000	1,000,000	-
2.2	Belanja Tidak Langsung	1,713,518,303	1,590,638,596	(122,879,707)
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	453,600,000	422,400,000	(31,200,000)
2.2.1.1	Tambahan Penghasilan Tetap	453,600,000	422,400,000	(31,200,000)
2.2.1.1.1	Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Pemerintah Nagari	408,600,000	377,400,000	(31,200,000)
2.2.1.1.2	Tambahan Penghasilan Tetap BAMSUS Pemerintah Nagari	45,000,000	45,000,000	-
2.2.2	Tunjangan	171,600,000	91,400,000	(80,200,000)
2.2.2.1	Tunjangan Perangkat Pemerintahan Nagari	171,600,000	91,400,000	(80,200,000)
2.2.2.1.1	Tunjangan Perangkat Pemerintah Nagari	100,200,000	56,400,000	(43,800,000)
2.2.2.1.2	Tunjangan Perangkat BAMSUS Nagari	59,400,000	23,000,000	(36,400,000)
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	1,085,959,266	1,074,959,266	(11,000,000)
2.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan			

		1,085,959,266	1,074,959,266	(11,000,000)
2.2.5.1.1	Kepada Lembaga Adat	54,000,000	54,000,000	-
2.2.5.1.2	Belanja Bantuan Keuangan	60,000,000	60,000,000	-
2.2.5.1.3	Kepada Karang Taruna	25,000,000	25,000,000	-
2.2.5.1.4	Belanja Bantuan Keuangan	26,000,000	15,000,000	(11,000,000)
2.2.5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	75,750,000	75,750,000	-
2.2.5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	15,000,000	15,000,000	-
2.2.5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	55,000,000	55,000,000	-
2.2.5.1.8	Belanja Bantuan Keuangan	768,000,000	768,000,000	-
2.2.5.1.9	Belanja Bantuan Piliwani	7,209,266	7,209,266	-
2.2.6	Belanja Tak Terduga	2,359,037	1,879,330	(479,707)
2.2.6.1	Belanja Keadaan Darurat	-	-	-
2.2.6.1.1	Belanja Tak Terduga Keadaan Darurat	-	-	-
2.2.6.2	Bencana Alam	2,359,037	1,879,330	(479,707)
2.2.6.2.1	Belanja Tak Terduga Bencana Alam	2,359,037	1,879,330	(479,707)
3.	PEMBIAYAAN	170,820,596	170,820,596	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	320,820,596	320,820,596	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu	320,820,596	320,820,596	-
3.1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu	320,820,596	320,820,596	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	150,000,000	150,000,000	-
3.2.2	Penyertaan Modal Nagari	150,000,000	150,000,000	-
3.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Nagari	150,000,000	150,000,000	-
3.2.2.1.1	Penyertaan Modal Pemerintah Nagari Ke BUMNAG	150,000,000	150,000,000	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	150,000,000	150,000,000	-

a. Pendapatan Asli Nagari :

Target Pendapatan Asli Nagari tahun 2014

Rp. 386.950.000,-

Target PAN Perubahan tahun 2014

Rp. 193.700.000,-

Pencapaian Target tahun 2014

Rp. 177.867.500,-

Realisasi Pencapaian Target

Rp. 164.086.669,-

Sisa PAN tahun 2014  
 Dengan Uraian Sebagai Berikut :

1. Hasil Usaha Nagari	Rp. 6.000.000,-
Target APB Nagari th 2014	Rp. 6.000.000,-
Target APB Perubahan Nagari th 2014	Rp. 0,-
2. Hasil Kekayaan Pengelolaan Nagari	Rp. 20.000.000,-
Target APB Nagari th 2014	Rp. 20.000.000,-
Target APB Perubahan th 2014	Rp. 0,-
3. Iuran Nagari	Rp. 150.000.000,-
Target APB Perubahan Nagari th 2014	Rp. 150.000.000,-
Target APB Perubahan Nagari th 2014	Rp. 60.000.000,-
Pencapaian Target	Rp. 34.820.000,-
4. Jasa Registrasi Pelayanan Administrasi	Rp. 210.950.000,-
Target APB Nagari th 2014	Rp. 210.950.000,-
Target APB Perubahan Nagari th 2014	Rp. 127.700.000,-
Pencapaian Target	Rp. 143.047.500,-
b. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 0,-
Target APB Nagari th 2014	Rp. 52.522.162,-
Target APB Perubahan Nagari th 2014	Rp. 52.522.162,-
Pencapaian Target	Rp. 52.522.162,-
Realisasi Bagi Hasil Pajak	Rp. 25.326.000,-
Sisa	Rp. 27.196.162,-
c. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 0,-
Target APB Nagari th 2014	Rp. 5.565.251,-
Target APB Perubahan Nagari th 2014	Rp. 5.565.251,-
Pencapaian Target	Rp. 5.565.251,-
Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 1.390.921,-
Sisa	Rp. 4.174.330,-

d. Dana A D N Nagari tahun 2014	Rp. 1.440.000.000,-
Jumlah dana A D N Tahun 2014	Rp. 1.363.404.866,-
Realisasi A D N Tahun 2014	Rp. 76.595.134,-
Sisa Dana A D N	
e. Dana Silpa Tahun 2013	
Jumlah Dana Silpa Tahun 2013	Rp. 320.820.596,-
Realisasi Tahun 2014	Rp. 116.228.256,-
Sisa Silpa Tahun 2013	Rp. 204.592.340,-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 1.996.775.509,-</b>

3. Permasalahan dan Penyelesaiannya

- a. Permasalahan
- 1) Pelaksanaan Pungutan Pendapatan Asli Nagari belum maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas.
  - 2) Pengawasan Pungutan belum Maksimal.
  - 3) Belum adanya Perluasan Basis Penerimaan pendapatan asli nagari.
  - 4) Nilai tarif Basis Penerimaan Pendapatan Asli Nagari masih mengacu pada Peraturan Nagari nomor Tahun 2009, sudah tidak relevan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

b. Penyelesaian

- 1) Secara Kualitas Pungutan Pendapatan Asli Nagari harus lebih ditingkatkan mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi secara continue. Secara kuantitas perlunya sosialisasi tentang pentingnya peran aktif anak nagari dalam berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan.
- 2) Perlunya peningkatan pengawasan secara terpadu baik secara administrasi maupun motivasi terhadap anak nagari.

- 3) Perlunya peningkatan Perluasan Basis Penerimaan Pendapatan Asli Nagari terutama tentang pengelolaan hasil perkebunan dan hasil industri. hal ini sangat dominan karena produk unggulan nagari kinali pada saat ini bertolak dari sector perkebunan dan industry penunjangnya.

- 4) Diperlukan revisi terhadap peraturan nagari nomor 01 tahun 2009 tentang registrasi Nagari untuk peningkatan pungutan pendapatan asli nagari.

**B. PENGELOLAAN BELANJA NAGARI**

**1. Kebijakan Umum Keuangan Nagari**

**2. Target dan realisasi belanja**

a. PAN dan Silpa	Target Belanja PAN dan Silpa Awal	Rp. 607.770.593,-
	Target Belanja PAN dan Silpa Perubahan	Rp. 414.520.596,-
	Realisasi Belanja PAN dan Silpa	Rp. 280.314.925,-
b. A D N	Realisasi Belanja	Rp. 1.363.404.866,-
c. Target Belanja Bagi Hasil Pajak	Realisasi	Rp. 52.522.162,-
		Rp. 25.326.000,-
d. Target Bagi Hasil Retribusi	Realisasi	Rp. 5.565.521,-
		Rp. 1.390.921,-
<b>Jumlah Belanja</b>		<u>Rp. 1.670.436.712,-</u>

Jadi Silpa Tahun 2014 = Rp. 1.996.775.509,- - 1.670.436.712,-

= Rp. 326.338.797,-

**Realisasi APB Perubahan Tahun 2014**

Target Penerimaan Tahun 2014 ditambah Penerimaan Pembiayaan Rp. 2.281.590.889

Realisasi Penerimaan

Rp. 1.670.436.712

**Realisasi APB Tahun 2014 dari rencana**

Rp. 1.670.436.712 X 100 % = 73 %

Rp. 2.281.590.889

3. Permasalahan dan Penyelesaian
  1. Sumber Daya Manusia di Nagari yang masih sangat minim baik secara kualitas dan kuantitasnya. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
  2. Masih Kurangnya Pengkajian dan Penggalan Potensi Pengelolaan Sumber Daya alam dan Juga Hasil Industri serta limbah industry. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
  - 3: Tidak jelasnya pelimpahan dan juga rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan juga Hasil industry serta limbah Industri. (Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten)
  4. Perawatan dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum maksimal pemberdayaan dan pengelolaannya oleh kelompok masyarakat. (Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten)
  5. Anak Nagari mayoritas tidak memahami akan idiologi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Sebagai Landasan Idiel dalam kehidupan bernagari. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
  6. Banyaknya sengketa tanah. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
  7. Beberapa Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan yang berakibat kontradiktif ditengah masyarakat. Sehingga berdampak kepada hasil pembangunan yang lainnya. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
  8. Masih minimnya produk hukum nagari tentang pengelolaan sumber daya alam dan hasil industry.
  9. Jumlah penduduk yang belum tertata dengan terat
  10. Tapal batas kejonngan yang belum jelas

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. URUSAN HAK ASAL USUL NAGARI

1. Program dan kegiatan

Dasar Hukum :

1. Peraturan Nagari Kinali Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kinali (RPJM-Nagari)
2. Perna 01 tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
3. Peraturan Nagari nomor : 02 tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Nagari Kinali Tahun 2014

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

- Pembangunan Jalan Tani Sigumanti A

- Biaya Rp. 198.871.000,-
- Swadaya Rp. 1.850.000,-

- Pembangunan Jalan Bateh Uba

- Biaya Rp. 199.855.000,-
- Swadaya Rp. 1.850.000,-

- Pengerasan / Pembangunan Jalan Tani Ampék Koto Rp. 50.352.000,-

- Swadaya 0

- Pembangunan Dinding Saluran Irigasi Sigumanti B Rp. 67.352.000,-

- Swadaya Rp. 1.000.000,-

- Pembangunan Jalan Tani INKUD Langgam A Rp. 151.058.000,-

- Rp. 2.000.000,-

Pembangunan Jembatan dan Gorong-gorong Plat

INKUD Langgam B Rp. 99.925.000,-

Hasil Pembangunan tersebut adalah merupakan barang inventaris nagari, yang selanjutnya tercatat dalam Buku Inventaris Nagari Kinali, Kartu Inventaris Barang (KIB) D Nomor : 125, 126, 127, 128, 129, 130 dengan kode barang 04.16.02.02.03.

Kegiatan Lembaga Adat Nagari

Bantuan dimaksud diserahkan kepada "Sanggar Bina Karya Anak Nagari" senilai Rp. 2.500.000,- (ADN) dipergunakan untuk pembelian TAMBUA TASAAR 2 unit.

**Bantuan Masyarakat lainnya**

Bantuan Kegamaan tersebut dapat hendaknya menjadi stimulus dan motivasi dalam perberdayaan lembaga keagamaan di wilayah Nagari Kinali.

BERSUMBER DANA SILPA TAHUN SEBELUMNYA	BERSUMBER DANA ADN	JENIS LEMBAGA/BADAN	Bantuan untuk Masjid	Rp. 8.000.000,-	45.750.000,-
		Bantuan untuk Mushala	Rp. 6.000.000,-		
		Bantuan untuk TPA/TPSA	Rp. 8.000.000,-		
		Bantuan Wirid Yasin	Rp. 8.000.000,-		

**Bantuan Lembaga Kegamaan**

Diharapkan Bagi hasil dimaksud dapat hendaknya menjadi Pendapatan Asli Nagari.

penyerahan dana melalui transfer Dana kereening penerima bantuan. setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Budaya dengan tercantum dalam MOU (Perjanjian Kerjasama) dengan pihak Pemerintahan Nagari Nagari Kinali, Sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan kriteria bagi hasil sebagaimana BMT Sakinah yang berdomisili usaha di pasar durian Kilangan Jorong Langgam Bantuan Penyerahan modal kepada koperasi pada tahun 2014 ini diberikan Kepada

**Koperasi**

Karang Taruna yang menerima bantuan sesuai dengan Rekomendasi oleh dinas sosial tenaga kerja adalah Karang Taruna 'DIAMOND' yang berdomisili usaha di jorong langgam bergerak dibidang " ES CAMELO" bantuan karang taruna dimaksud dapat hendaknya membantu pemberdayaan pemuda berwirasusaha, sehingga mampu berperan aktif dalam pemberdayaan pembangunan ekonomi dinagari kinali ini.

**Kegiatan Karang Taruna**

Bantuan yang diterima oleh Bundo Kandung Nagari diprioritaskan kepada operasional, belanja barang dan jasa serta belanja modal dalam kegiatan tahun 2014.

**Kegiatan Bundo Kandung**

Bantuan yang diterima oleh Kerapatan adat Nagari diprioritaskan kepada pengkajian diskusi terbatas undang-undang no. 6 tahun 2014, hal ini menyikapi apakah, bagaimana, mengapa tindak lanjut strategi pelaksanaan pemerintahan Nagari Kedepan dan sebagian lain dipertuntukan untuk belanja Barang dan jasa serta belanja modal KAN Kinali untuk tahun 2014.



Bantuan tersebut dapat hendaknya memotivasi semangat seni dan pemberdayaan budaya dilindungi anak Nagari Kinali ini didukung dengan SK Wali Nagari Kinali

### Rehab Kantor

Tahun 2014 Wali Nagari Kinali melaksanakan pembangunan Rehab Kantor yang Dananya bersumber dari belanja Modal senilai Rp. 44.760.500,- Ruangan yang direhab hampir menyeluruh adalah sebagai berikut :

1. Sebelumnya Ruang Tunggu Pelayanan sekarang difungsikan sebagai Ruang Rapat dan juga Ruang pertemuan, tidak ditemui jalan poros pelayanan, jalan tersebut pintu utama, pintu keruang Kepala Urusan dan Pintu Ke Ruang Wali Nagari, Aula juga difungsikan sebagai Ruang Pustaka (taman Bacaan).
2. Sebelumnya Ruang Pelayanan sekarang difungsikan menjadi ruang tunggu Pelayanan.
3. Sebelumnya Ruang Bagian Keuangan sekarang difungsikan menjadi ruang Pelayanan dipimpin oleh Sekretaris Nagari.

4. Ruangan Kepala Urusan sebelumnya memakai pembatas sekarang tidak ada pembatas ruangan, jalan utama alur pelayanan, dan juga arsip masing-masing Kepala Urusan.
5. Ruang Sekna yang sebelumnya pintu menghadap ke Aula sekarang pintu menghadap keruang kaur langsung keruang Wali Nagari dengan Pembatas Ruang.

### Belanja Modal

Gorden 1 (satu) set	Rp	8.362.500,-	Silpa
Kursi Rapat Futura 40 Buah	Rp.	16.800.000,-	ADN
Kursi Putar 2 Buah	Rp.	3.000.000,-	Silpa
Laptop 2 Buah	Rp.	8.505.000,-	ADN
Kipas Angin 2 Unit	Rp	1.418.200,-	ADN
Printer HP Laser Jet 2(duo) pcs	Rp.	1.937.000,-	ADN
Podium 1 Unit	Rp.	2.181.818,-	ADN

Hasil Belanja Modal tersebut adalah merupakan barang inventaris nagari, yang selanjutnya tercatat dalam Buku Inventaris Nagari Kinali, Nomor : 67, 80, 81, 82,83, 84.

Dana Alokasi Khusus Nagari 254.818.950,- Untuk Pembelian 17 Unit Kendaraan Merk Honda Blade.

Hasil Belanja Modal Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 tersebut adalah merupakan barang inventaris nagari, yang selanjutnya tercatat dalam Buku Inventaris Nagari

Kinalli, Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin dengan Nomor : 04 kode barang : 02.03.01.05.01 Nomor register : 017.

2. Realisasi Pelaksanaan kegiatan
1. Dana Pemberdayaan masyarakat untuk tahun 2014 telah terealisasi 100% dari pagu dana yang tersedia tahun anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut:

-	Pembangunan Jalan Tani Sigunanti A	• Biaya	Rp. 198.871.000,-
		• Swadaya	Rp. 1.850.000,-
-	Pembangunan Jalan Bateh Uba	• Biaya	Rp. 199.855.000,-
		• Swadaya	Rp. 1.850.000,-
-	Pengerasan / Pembangunan Jalan Tani Ampek Koto	• Swadaya	0
		• Swadaya	Rp. 50.352.000,-
-	Pembangunan Dinding Saluran Irigasi Sigunanti B	• Swadaya	Rp. 67.352.000,-
		• Swadaya	Rp. 1.000.000,-
-	Pembangunan Jalan Tani INKUD Langgam A	• Swadaya	Rp. 151.058.000,-
		• Swadaya	Rp. 2.000.000,-
	Pembangunan Jembatan dan Gorong-gorong Plat		Rp. 99.925.000,-

2. Dana Lembaga KAN untuk tahun 2014 telah terealisasi 100% dari pagu dana yang tersedia tahun anggaran 2014 (dimana dana tersedia 32.000.000,-) penyerahan dana tersebut melalui transfer ke rekening KAN.
3. Dana PKK Nagari Kinalli untuk tahun 2014 telah Terealisasi 100% dari pagu dana yang tersedia tahun anggaran 2014 ( Dana tersedia 40.000.000,- ) penyerahan dana tersebut melalui transfer rekening PKK.
4. Dana Lembaga Keagamaan hanya terealisasi 30 % dari pagu dana yang tersedia tahun anggaran 2014 ( Dana tersedia 30.000.000 ditambah dengan SILPA tahun sebelumnya 47.750.000,- ) diberikan secara tunai, karena jumlah bantuan masing-masing penerima bantuan yang jumlahnya telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sesuai juknis yang ada, dimana bantuan yang jumlahnya dibawah 1.500.000,- boleh dilakukan penyerahan secara Tunai.

Adapun Daftar Nama-nama Penerima Bantuan Lembaga Keagamaan yang melengkapi Proposal Bantuan dan sesuai dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kinalli Nomor: 19/Wn.KnI/IV/2014 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Nama	Jorong	Jumlah	Sumber Dana
1	Mesjid Nurul Iman Kp: Lambah	Anam Koto Utara	Rp.1.000.000	SILPA 2013
2	Mesjid Al-mukminin	Limpato	Rp.1.000.000	SILPA 2013
3	Mesjid Quba Kajai	Langgam Saiyo	Rp.1.000.000	SILPA 2013
4	Mesjid Al-Fath Bc. Rambai	Langgam	Rp.1.000.000	SILPA 2013
5	Mesjid Al-Mukaramah	Anam Koto Selatan	Rp.1.000.000	SILPA 2013
6	Mesjid Nurul Fitriah	Koja	Rp.1.000.000	SILPA 2013
7	MesjidManarul Islam Padang Canduah	Padang canduah	Rp.1.000.000	SILPA 2013
8	Mesjid Al-Falah Alamanda	Bunuk	Rp.1.000.000	SILPA 2013
9	MesjidAl-Istiqomah Bayur Kabung	Ampok Koto	Rp.1.000.000	ADN 2014
10	Mesjid Nurul Hikmah	Langgam Sepakat	Rp.1.000.000	ADN 2014
11	Mesjid Al-Hidayah	Limau Puruk	Rp. 500.000	SILPA 2013
12	Mesjid Nurul Iman Wonosari	Bancak Kariang	Rp. 500.000	SILPA 2013
13	Mesjid Nur-Hidayah Sidomulyo	Mudiak Labuah	Rp. 500.000	SILPA 2013
14	Mesjid Al-Mukminin	Bandua Balai	Rp. 500.000	SILPA 2013
15	Mesjid Al-Mujahidin	Tandikek	Rp. 500.000	SILPA 2013
16	MesjidAl-Azhar	Ampok Koto Barat	Rp. 500.000	SILPA 2013
17	Mesjid Al-Furqan	Anam Koto Selatan	Rp. 500.000	ADN 2014
18	Mesjid Al-Istiqomah	Langgam Sepakat	Rp. 500.000	ADN 2014
19	Mesjid Al-Munawarah	Ampok Koto	Rp. 500.000	ADN 2014
20	Mesjid Babul Amal	Sigunanti	Rp. 500.000	ADN 2014
21	Mesjid At-Taqwa Dr. Kilangan	Langgam	Rp. 500.000	ADN 2014
22	Mesjid Mushalla	Mudiak Labuah	Rp. 500.000	SILPA 2013
23	Mesjid Mushalla Al-Azhar Rambah	Ampok Koto Barat	Rp. 500.000	SILPA 2013
24	Mesjid Al-Hidayah	Tandikek	Rp. 500.000	ADN 2014
25	Mesjid Al-Mukminin Base Camp	Anam Koto Selatan	Rp. 500.000	ADN 2014
26	Mesjid Al-Muttaqin	Anam Koto Utara	Rp. 500.000	ADN 2014
27	Mesjid Al-Bancak	Wonosari Kariang	Rp. 500.000	ADN 2014
28	Mesjid Labuah	Mudiak Labuah	Rp. 500.000	SILPA 2013
29	Mesjid Muslimah	Tandikek	Rp. 500.000	ADN 2014
30	Mesjid Silambau	Langgam	Rp. 500.000	ADN 2014

	Sepakat		
31	Wirid Yasin Akbar Ibu- ibu Wonosari	Bancuh Kariang	Rp. 500.000 AD N 2014
32	Wirid Yasin Gantiang	Rimbo Anam Koto Selatan	Rp. 500.000 AD N 2014

5. Dana Untuk lembaga masyarakat hanya teralisasi ± 12,5 % dari dana yang tersedia tahun 2014 ( 12,5 % dari 20.000.000 = Rp 2.500.000,-)

3. Permasalahan dan penyelesaiannya

Tidak teralisasinya sebagian Dana ADN disebabkan karena adanya beberapa bantuan yang harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait, dan juga terhadap lembaga keagamaan masyarakat cenderung bertikiran kurang percaya dana tersebut akan teralisasi. Itupun pemerintah Nagari telah menyampaikan melalui Dai keorongan sebagai perpanjangan tangan dari Wali Nagari Kinalli.

Dan untuk tahun 2015 pemerintah Nagari berupaya untuk lebih memaksimalkan pencairan dana AND tersebut agar dapat teralisasi secara keseluruhan, sehingga mampu meningkatkan pemerataan pembangunan disegala bidang serta menciptakan masyarakat yang sejahtera.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Program dan kegiatan

- a. Program Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan tahun 2014.
- b. Program Percepatan Pendaftaran Tanah (BPN).

2. Realisasi Pelaksanaan kegiatan

PERDESAAN DAN PERKOTAAN	14.018 stts	Realisasi 280.833.147,-
	Target 556.853.713,-	

a. Program Percepatan Pendaftaran Tanah (BPN).

Telah Terealisasi sejumlah 100 persil.

b. Program Pemilihan Wali Nagari Kinalli.(Kabag.Pem.Nag) telah teralisasi dan telah dilaksanakan Pelantikan Wali Nagari Terpilih.

3. Permasalahan dan penyelesaiannya

a. Tidak jelasnya pelimpahan dan juga rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan juga Hasil industry serta limbah Industri. (Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten)

- b. Perawatan dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum maksimal pemberdayaan dan pengelolannya oleh kelompok masyarakat.(Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten).
- c. Belum adanya kesepakatan antara masing-masing pihak tentang tapal batas hutan lindung.
- d. Masih ada perbedaan kesepakatan antara pemerintah Kab. Pasaman dengan Kab.Pasaman Barat tentang batas wilayah administrasi.

PENYELINGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum  
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari; Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari;  
Keputusan Wali Nagari nomor : 37/S.Keps/WN-Knl/2014 tentang penunjukan petugas PAD Nagari Kinalli tahun 2014.  
Surat Keputusan Wali Nagari Kinalli Nomor : Tanggal tentang Penunjukan Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan retribusi daerah.
2. Instansi yang memberikan Pembantuan  
Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Nagari  
Tim Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan retribusi daerah.
4. Pelaksanaan Kegiatan Yang Diterima  
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014.
5. Sumber dan jumlah anggaran  
Pajak bumi dan bangunan bersumber dari wajib pajak diwilayah nagari kinalli.

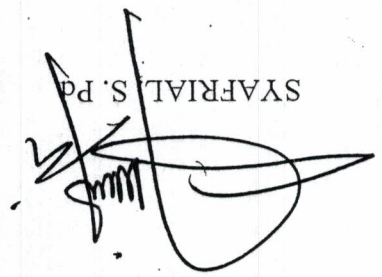
Target pajak bumi dan bangunan tahun 2014	562.898.199,-
Realisasi Nominal pajak bumi dan bangunan per 20 desember 2014	280.833.147,-
Realisasi Setoran pajak bumi dan bangunan per 20 desember 2014	280.833.147,-
Jumlah STTS	9.673
Prosentase pencapaian Target	49,9 %
Bagi hasil Pajak yang diterima oleh pemerintah nagari	52.522.162
Bagi hasil Retribusi yang diterima oleh pemerintah nagari	5.565.251

1. Dasar Hukum
- Undang – undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  - Undang – undang nomor 27 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.
  - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas Pembantuan

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

6. Permasalahan
- a. Objek Pajak yang tercatat di dalam SPT tidak sesuai dengan luas objek yang sebenarnya.
  - b. Nama Subjek pajak banyak tidak sesuai dengan KTP dan Sertifikat.
  - c. Nilai Pajak terlalu tinggi banyak masyarakat mengajukan pengurangan jumlah pajak terhutang.
  - d. Objek Pajak banyak terjadi pemecahan namun di SPT belum dipecah.
  - e. SPT banyak ganda pada pemecahan.
  - f. Masih banyak tanah belum terdaftar sebagai objek pajak.
- Penyelesaian
- a. Telah dilaksanakan inventarisasi permasalahan pajak pada tahun 2014.
  - b. Pendaftaran tanah yang belum masuk sebagai objek pajak.

Realisasi belanja Bagi hasil pajak yang diterima oleh pemerintah nagaridengn rincian	
• Belanja insenti	Rp. 13.130.000,-
• Belanja ATK Pemungutan Pajak	Rp. 1.831.000,-
• Belanja Operasional Penggantian Transportasi	Rp. 10.365.000,-
Petugas PAD	Rp. 27.196.162,-
Sisa Bagihasil Pajak	Rp. 27.196.162,-
Realisasi belanja Bagi hasil Retribusi yang diterima oleh pemerintah nagari	Rp. 1.390.921,-
• Belanja insentif	Rp. 4.174.330,-
Sisa Bagi Hasil Retribusi	Rp. 4.174.330,-
Realisasi belanja Bagi hasil pajak yang diterima oleh	25.326.000,-


  
 SYAFRIAL S. Pd.

WALI NAGARI KINALI

Kinali, 20 Maret 2015

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun, disajikan dan disampaikan untuk dapat dimaklumi adanya.

Kami sadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami minta kepada Pimpinan beserta anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kinali untuk dapat memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari untuk masa yang akan datang.

**PENUTUP**

4. Sarana dan prasarana
  - Prasarana yang diberikan adalah penyediaan blanko Kependudukan dengan Pengadaan Blanko F-1 hingga F-39. oleh Capil
3. Sumber dan jumlah anggaran
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemda Pasaman Barat.
  - Sumber dan jumlah anggaran
  - Pelayanan dibidang Kependudukan (KK, KTP, Datang/Pindah, lahir dan meninggal).
  - Pelaksanaan Kegiatan Yang Diterima
  - Petugas Kependudukan dan Pencatatan sipil Nagari.
  - Satuan pelaksana kegiatan Nagari
  - Pasaman Barat.
  - Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**BADAN MUSYAWARAH**  
**BAMUS**



NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durian Kilangan Telp (0753) 469088 Kode Pos 26367

**SURAT KEPUTUSAN BAMUS NAGARI KINALI**  
**KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
Nomor : ...../BAMUS/IV/2015

**TENTANG**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) NAGARI KINALI**

**TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN MUSYAWARAH NAGARI KINALI**

- Memimbang :**
- a. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan Nagari sekaligus penyelenggaraan Program Tahunan Nagari, maka perlu ditetapkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Kinali Tahun 2014.
  - b. Bahwa untuk pelaksanaan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari Kinali.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No 5234)

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Umum Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Bantuan Pemilihan Wali Nagari,
19. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/226/Bup-Pasbar-2014 tentang Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
20. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/227/Bup-Pasbar-2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Nagari (ADN) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
21. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/228/Bup-Pasbar-2014 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
22. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/723/Bup-Pasbar/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
23. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/724/Bup-Pasbar/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
24. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/1016/Bup-Pasbar/2014 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari ( Bamus ) Nagari Kinali Kecamatan Pasaman Barat Periode 2014-2020
25. Peraturan Nagari Kinali Nomor: 01 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB) Tahun anggaran 2014
26. Peraturan Wali Nagari Kinali Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Penetapan satuan Standar Biaya Pemerintahan Nagari Kinali

1. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Nagari Yang di sampaikan Wali Nagari Kinalli Pada Tanggal 25 Maret Tahun 2015.
2. Sidang PLENO BAMUS Nagari Kinalli tanggal Tanggal 08 April 2015
3. Sidang Paripurna Bamus Nagari Kinalli tanggal 10 April 2015 Tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Nagari Kinalli tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

Mengesahkan dan Menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Nagari Kinalli tahun 2014.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Kilangan  
 Pada Tanggal : 10 April 2015.  
 Badan Musyawarah Nagari Kinalli  
 KETUA

  
 ZAINUDDIN SYAM

- Tembusan disampaikan kepada yth:
1. Yth, Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampok
  2. Yth, Bapak Camat Kinalli di Basung Indah
  3. Wali Nagari Kinalli
  4. Arsip

Pertama  
 Kedua

Memperhatikan

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 BADAN MUSYAWARAH  
**BAMUS**

NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durian Kilangan Telp (0753) ..... Kode Pos 26367

BERITA ACARA

Nomor : 02./BAMUS/WN-KNL/IV-2015

PERSEJUTUAN BERSAMA  
 WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KINALI

TENTANG

PERATURAN NAGARI TENTANG  
 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) NAGARI KINALI  
 TAHUN 2014

Pada Hari ini Jumat tanggal Sepuluh Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tanda tangan dibawah ini :

1. SYAFRIAL, S.Pd

Wali Nagari. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Nagari Kinali yang beralamat di Aur Badidik yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. ZAINUDDIN SYAM

Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

3. ALI NASIR

Wakil Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** Telah membahas dan menyetujui Laporan keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Nagari Kinali Tahun Anggaran 2014 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Nagari Kinali Tahun 2014.
  3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.
- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI KINALI

SYAFRIAL, S.Pd

BAMUS NAGARI KINALI

KETUA

ZAINUDDIN SYAM

BAMUS NAGARI KINALI

WAKIL KETUA

ALI NASIR



**NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2013**



**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)  
WALI NAGARI KINALI TAHUN ANGGARAN 2013**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. DASAR HUKUM

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi, Kabupaten Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran negara Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Perubahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

17. Peraturan Nagari Kinall Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Kinall Tahun 2013;

18. Peraturan Nagari Kinall Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Kinall Tahun 2013;

## B. GAMBARAN UMUM I. KONDISI GEOGRAFIS

- ✓ Ketinggian dari permukaan laut ± 46 M
- ✓ Letak Geografis 00°03' LU - 00°11' LS dan 99°45' BT - 99°03' BT

Luas Wilayah Nagari Kinall 365,57 Km<sup>2</sup> dengan balas – balas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan Nagari koto baru kecamatan Luhak Nan Duo.
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tigo Nagari, dan Kabupaten Agam.
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tigo Nagari kabupaten pasaman
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Katagan/ Mandiangin.

## 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk Nagari Kinall berdasarkan Laporan petugas Registrasi kependudukan Nagari Kinall tahun 2013

### MUTASI PENDUDUK MENURUT NAGARI

Nagari / Jorong	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lahir	1.382	365	182	101	
Mati					
Datang					
Pindah					
<b>Kinall</b>	<b>1.382</b>	<b>365</b>	<b>182</b>	<b>101</b>	
Jumlah Kelahiran	1.382 jiwa.				
Jumlah Kematian	365 jiwa.				
Jumlah Datang	182 jiwa.				
Jumlah Pindah	101 jiwa.				

**PENDUDUK PER JENIS KELAMIN**

Negeri / Jorong	Penduduk				Sex Ratio
	L	P	L+P		
(1)	30.591	30.914	61.495	99	(5)
Kinalli					

Jumlah Penduduk 61.405 jiwa Laki-laki 30.581 jiwa perempuan 30.824 jiwa.

**LUAS JORONG, BANYAKNYA RUMAH TANGGA DAN PENDUDUK**

**PER NAGARI / JORONG**

Negeri	Luas (Km <sup>2</sup> )	RT	Pendd	Rata-rata Pendd	
				Km <sup>2</sup>	RT
(1)	365,57	14.356	61.405	168	4
Kinalli					

Luas Wilayah administrasi Nagari Kinalli 365,57 Km<sup>2</sup>

Jumlah Kepala Keluarga/Rumah Tangga 14.356 KK.

Jumlah Penduduk 61.405 jiwa.

Kepadatan Penduduk rata-rata 168 jiwa per kilometer persegi.

Kata-rata jumlah penduduk per Kepala Keluarga/ rumah Tangga 4 jiwa per kk.

**3. KONDISI EKONOMI**

**a. Potensi Unggulan Nagari**

1) Perkebunan  
 Mayoritas wilayah nagari kinalli didominasi oleh perkebunan sawitswasta, BUMN dan perkebunan sawit rakyat. Dinamika perkembangan Perkebunan Sawit di Nagari Kinalli cukup maju pesat sehingga hal ini berdampak kepada :

i. Meningkatkan Pertumbuhan Perkapita Anak Nagari Kinalli dari tahun ketahun, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Anak Nagari hal ini sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor lainnya.

ii. Nagari Kinalli merupakan salah satu barometer perdagangan sawit di daerah Pasaman Barat Khusus nya dan sekitarnya. Hal ini didukung oleh 3 Perusahaan Pabrik Sawit.

iii. Hal ini secara langsung juga telah menambah lapangan pekerjaan baik disektor perkebunan dan juga industri.

iv. Dampak Pertumbuhan sector perdagangan juga sangat kuat di daerah industri, hal ini dibuktikan dengan arus transportasi yang semakin padat oleh hasil industri contohnya : CPO, Karnel, cangkang sawit dan juga limbah pabrik lainnya.

v. Dampak Pertumbuhan sector Pendidikan juga semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan hasil Wisudawan S 1 & S 2 semakin banyak.

Diharapkan dengan peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia di Nagari Kinalli Kedepan akan terwujudlah VISI dan MISI Nagari Kinalli.

**2) Pertanian Holtikultura**



i. jagung juga merupakan Produk Unggulan, hal ini juga sangat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya Petani Jagung, dan juga telah banyak membuka lapangan pekerjaan baru misalnya: agen jagung yang juga mempekerjakan beberapa karyawan.

ii. Produksi jagung pada saat ini masih dipergunakan sebagian besar untuk bahan dasar pakan ternak yang diproduksi di beberapa kota/kabupaten disekitar Nagari Kinali misalnya di Kota Padang, Kota Payakumbuh dan hanya sebagian kecil diproduksi di dalam Nagari Kinali.

Partwisala  
 Di Nagari Kinali ada beberapa objek Wisata unggulan namun hal ini belum dikelola secara profesional karena investor belum ada yang tertarik dengan potensi dimaksud diantaranya :

- Muaro Bingung di ampek Koto
- Objek Wisata Istimik Laruang Sitauibu
- Batu Balipek di air meruap
- Pemandian Mata air di air meruap
- Air terjun Siburai-burai di durian Tibarau
- Air terjun Siburai-burai di durian Kandang
- Tabek Gadang Baricali Supai Air Meruap.

Kegamaanan  
 Nagari Kinali juga merupakan salah satu daerah yang kuat dengan aliran Tasawwuf, ini dibuktikan dengan masih kuatnya aliran Tharikat Nagasabandiah yang berkembang, yang berpusat di Durian Tibarau Nagari Kinali. SyechMudo Abdurrahman adalah seorang ulama yang menyebarkan Tasawwuf ini di daerah Nagari Kinali dan sekitarnya. Bahkan sampai saat ini diperkuat dengan berdirinya beberapa surau tharikat oleh khalifah dan Tuanaku sebagai wujud dan kependulian terhadap perkembangan tharikat di Nagari Kinali dan sekitarnya.

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Perekonomian dinagari kinali didukung oleh beberapa faktor perekonomian, sesuai dengan kondisi wilayah nagari kinali :

- 3) Pertanian
- 4) DII

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

A. VISI DAN MISI

1. VISI Nagari

" MEWUJUDKAN NAGARI MENJADI MANDIRI MELALUI BIDANG PERTANIAN DAN INDUSTRI KECIL "

- a) Nilai-nilai yang mendasari :
  - Selama dua tahun belakang ini (Pra RPJM) Nagari Kinali menyanggah gelar Sebagai Nagari Kategori Nagari Berprestasi. Sebuah sebutan yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Nagari Kinali umumnya.
  - Sebagian besar warga Petani dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.
  - b) Marna yang terkandung :
    - Terwujudnya : Terkandung didalamnya peran Pemerintah dalam mewujudkan Nagari Kinali yang mandiri secara ekonomi.
    - Nagari Kinali : adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat dengan segala potensinya dalam system Pemerintahan diwilayah Nagari Kinali.
    - Mandiri : Adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
    - Pertanian : Bahwa sector pangan adalah hal utama dalam Perekonomian, sehingga tidak akan terjadi kerawanan Pangan di Nagari Kinali.

2. MISI Nagari

- a) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- b) Meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) melalui pendidikan maupun non Formal.
- c) Bekerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian.
- d) Meningkatkan usaha pertanian.
- e) Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Nagari.
- f) Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi Daerah.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN NAGARI

1. STRATEGI PEMBANGUNAN .

Strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi dan misi adalah :

1. Menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan dan tidak semata-mata menjadi objek pembangunan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat Nagari dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan pembangunan.
3. Meningkatkan daya dan kemampuan masyarakat Nagari untuk dapat berusaha sesuai dengan keterampilan dan dukungan potensi Nagari.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang profesional sebagai pelayan masyarakat dan bukan sebagai penguasa.
5. Meningkatkan pemahaman hukum formal dan hukum adat sehingga tercipta masyarakat Nagari yang bermartabat dan sadar hukum.

6. Memantapkan momentum otonomi daerah untuk dapat menggalang segala potensi sumber daya alam Nagari secara efektif, efisien dan lestari serta meningkatkan pelayanan umum masyarakat yang cepat, tanggap dan berkeadilan.
7. Meningkatkan pendidikan yang berbasis agama/ aqidah

## 2. AKAH KEBIJAKAN NAGARI.

### a) Arah Kebijakan Keuangan Nagari.

#### i. Arah Pengelolaan Pendapatan Nagari

- Pendapatan Nagari bersumber dari Pendapatan Asli Nagari/registrasi surat, Bagi Hasil Pajak Kabupaten, Bagi Hasil retribusi Kabupaten dan Dana Pemerintah.

Kebijakan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Nagari Kinall periode tahun 2010 – 2015 adalah :

1. Meningkatkan manajemen Pemerintahan Nagari
2. Pelaksanaan pembangunan dengan pola pemberdayaan dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan restrukturisasi manajemen Pemerintahan Nagari.
3. Reorientasi dan restrukturisasi manajemen pendidikan serta rekayasa social dan pengayaan budaya masyarakat.
4. Restrukturisasi perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan wilayah pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan penyehatan lingkungan.
5. Nilai-nilai agama menjiwa dan mewarnai setiap prilaku dan sikap hidup masyarakat Nagari di setiap bidang kehidupan.

## C. PRIORITAS NAGARI

Skala Prioritas yang telah dilaksanakan berdasarkan musrembang tahunan dengan sumber dana APBD PROVINSI SUMATERA BARAT, APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT, PPM MANDIRI, ALOKASI DANA NAGARI.

Pada dasarnya :

1. Diberikan prioritas untuk peningkatan infrastruktur
2. Diberikan prioritas juga memprioritaskan pembangunan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan, dan juga program Penyuluhan Kesehatan, Fosfor dan nutrisi.
3. Diberikan prioritas melaksanakan sertifikasi Baca tulis Alquran bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
4. Diberikan prioritas pada pembangunan PLTMH, dibidang Energi dan pertambangan diprioritaskan pada pengawasan terhadap pengelolaan
5. Bidang Sosial budaya diprioritaskan kepada Pembinaan Kesenian Tradisional.
6. Bidang Kelembagaan dan Keamanan diprioritaskan pada Pembangunan Sistem Keamanan Masyarakat Keliling.
7. Bidang Keagamaan diprioritaskan pada Penyuluhan oleh Da'i Nagari.

## KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARI

### BAB III

#### A. PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARI

##### 1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi

Intensifikasi diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Negara untuk meningkatkan Pendapatan Negara dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Terdapat beberapa indikator yang membentuk variabel ini yaitu:

1. Memperluas basis Pendapatan, dengan item-item yang membentuknya meliputi:
  - a) Mengidentifikasi Sektor, Jenis dan potensial Pendapatan Nagari.
  - b) Memperbaiki basis data Pendapatan, penilaian
  - c) Menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Meningkatkan pengawasan dengan item-item yang membentuknya meliputi:
  - a) mempercepat penyusunan Peraturan Nagari,
  - b) mengubah tarif pendapatan nagari dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan item-item yang membentuknya meliputi:
  - a) memperbaiki prosedur administrasi pendapatan nagari dan
  - b) meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

4. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan item yang membentuknya meliputi:
  - a) Memperluas basis penerimaan
  - b) Memperkuat proses pemungutan
  - c) Meningkatkan pengawasan
  - d) Meningkatkan efisiensi administrasi

antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

##### b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan Nagari yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari Sumber daya alam dan Aset Kekayaan Nagari, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Daerah dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, yakni pungutan pendapatan asli nagari yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan nagari berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiscal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

hal ini merupakan suatu ikatan yang perlu dijalin antara nagari dengan anak nagari akan pentingnya peran aktif anak nagari dalam mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkesinambungan. Ekstensifikasi pendapatan Nagari merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Nagari dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli nagari.

- ❖ Bagaimana Kerjasama Nagari dengan pihak perusahaan industry ?
- ❖ Mampukan Peraturan Nagari menjadi dasar hukum terhadap hasil produk perusahaan industry sebagai Wujud investasi kepada anak nagari dalam peranserta aktif pembangunan nagari ?
- ❖ Dalam Hal Perbankan, sudah efektifkah system kredit ditinggah ekonomi global saat ini terhadap pertumbuhan perkapita anak nagari ?

kebijakan-kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor local maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di Nagari.
- b. Memberi kemudahan bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di daerah dengan birokrasi yang berbelit-belit.
- c. Keseimbangan Pembangunan yang selaras dengan Sistem Adat, Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Ideologi ini lah yang menjadi Landasan Idiel dalam kehidupan Anak Nagari. Alam Takambang Jadi guru. d. Memprioritaskan investor local untuk menginvestasikan modalnya di Nagari.

2. Target dan realisasi Pendapatan

**a. Pendapatan Asli Nagari :**

Kode 1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi

Kode 1.1.3.1 Iuran Nagari  
Target APB Nagari th perubahan  
Target APB Perubahan Nagari th 2013  
Pencapaian Target

Kode 1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang syah Berdasarkan Perma Nomor 02 tahun 2009 tentang biaya administrasi

Kode 1.1.5.1.1 Jasa Registrasi Pelayanan Administrasi  
Target APB Nagari th 2013  
Target APB Perubahan Nagari th 2013  
Pencapaian Target

**b. Bagi Hasil Pajak Daerah**

Target APB Nagari th 2013  
Target APB Perubahan Nagari th 2013  
Pencapaian Target

**c. Bagi Hasil Retribusi Daerah**

Rp. 0,-  
Rp. 51.928.164,-  
Rp. 51.928.164,-

Target APB Nagari th 2013  
 Target APB Perubahan Nagari th 2013  
 Pencapaian Target

Rp. 0,-  
 Rp. 9.900.858,-  
 Rp. 9.900.858,-

**d. Bantuan Pilwana**

Jumlah Bantuan Pilwana

Rp. 317.740.956,-

**Total Alokasi Dana Nagari**

Rp. 1.379.569.378,-

**Realisasi AND**

Rp. 1.089.855.094,-

**Sisa**

Rp. 289.714.284,-

**3. Permasalahan dan Penyelesaiannya**

a. Permasalahan

- 1) Pelaksanaan Pungutan Pendapatan Asli Nagari belum maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas.

- 2) Pengawasan Pungutan belum Maksimal.

- 3) Belum adanya Perluasan Basis Penerimaan pendapatan asli nagari.

- 4) Nilai tarif Basis Penerimaan Pendapatan Asli Nagari masih mengacu pada Peraturan Nagari nomor Tahun 2009, sudah tidak relevan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

b. Penyelesaian

- 1) Secara Kualitas Pungutan Pendapatan Asli Nagari harus lebih ditingkatkan mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi secara continue.

- 2) Secara kuantitas perlunya sosialisasi tentang pentingnya peran aktif anak nagari dalam berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan.

- 3) Perluasan peningkatan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

- 2) Perluasan peningkatan secara terpadu baik secara administrasi maupun motivasi terhadap anak nagari.

- 3) Perluasan peningkatan Perluasan Basis Penerimaan Pendapatan Asli Nagari terutama tentang pengelolaan hasil perkebunan dan hasil industri. hal ini sangat dominan karena produk unggulan nagari kinali pada saat ini bertolak dari sector perkebunan dan industry penunjangnya.

- 4) Diperlukan revisi terhadap peraturan nagari nomor tahun 2009, peningkatan pungutan pendapatan asli nagari.

**B. PENGELOLAAN BELANJA NAGARI**

1. Kebijakan Umum Keuangan Nagari (belum)

2. Target dan realisasi belanja

a. Belanja AND Awal

Rp. 1.000.000.000,-

**Sisa Anggaran tahun 2013 Dana AND, PAN dan Silpa Tahun 2012**  
**Rp. 320.820.596,-**

Rp.	1.379.569.378,-	Belanja AND Perubahan
Rp.	1.089.855.094,-	Realisasi Belanja AND
Rp.	289.714.284,-	Sisa
Rp.	389.860.000,-	b. Belanja PAN Awal
Rp.	171.825.000,-	Belanja PAN Perubahan
Rp.	146.193.455,-	Pencapaian Target PAN
Rp.	146.191.726,-	Realisasi Belanja PAN
Rp.	1.729,-	Sisa
Rp.	129.104.583,-	c. Silpa Tahun 2012
Rp.	98.000.000,-	Realisasi Belanja Silpa
Rp.	31.104.583,-	Sisa Silpa Tahun 2012
Rp.	12.000.000,-	d. Belanja Bantuan Kes. Wali Awal
Rp.	13.982.000,-	Belanja bantuan Kes. Wali Perubahan
Rp.	12.000.000,-	Masuk rek. & realisasi

- 5) Sumber Daya Manusia di Nagari yang masih sangat minim baik secara kualitas dan kuantitasnya. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
- 6) Masih Kurangnya Pengkajian dan Penggalian Potensi Pengelolaan Sumber Daya alam dan Juga Hasil Industri serta limbah industri. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
- 7) Tidak jelasnya pemahaman dan juga rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan juga Hasil industry serta limbah Industri. (Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten)
- 8) Perawatan dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum maksimal pemberdayaan dan pengelolaannya oleh kelompok masyarakat. (Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten)
- 9) Anak Nagari mayoritas tidak memahami akan idiologi adat basandi syara; syara' basandi kitabullah. Sebagai Landasan Idiel dalam kehidupan bernagari. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
- 10) Banyaknya sengketa tanah. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
- 11) Beberapa Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan yang berakibat kontradiktif ditengah masyarakat. Sehingga

berdampak kepada hasil pembangunan yang  
lainnya.(Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)  
12)Masih minimnya produk hukum nagari tentang pengelolaan  
sumber daya alam dan hasil industry.



PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. URUSAN HAK ASAL USUL NAGARI

1. Program dan kegiatan

- 100 hari setelah pelantikan Kepala Jorong diprioritaskan peningkatan Kebersihan, Keindahan dan keamanan ketertiban.
- Pada tahun ini Kerapatan Nagari Kinali telah memprogramkan Pembinaan dan Pelatihan tentang penggunaan hak ulayat adat dan HGU kepada masyarakat hukum adat.
- Program TP PKK Nagari Kinali yaitu mensukseskan Pelaksanaan 10 Pokok Program Kegiatan PKK
- Program Tinjauan Lapangan (pemeriksaan) khusus untuk pembuatan surat keterangan Tanah Bekas milik adat.

2. Realisasi Pelaksanaan kegiatan

Di 7 kejurongan realisasi peningkatan Kebersihan telah mencapai 60 % disekitar pemukiman penduduk, untuk pasar durian kilangan telah dikelola oleh pengurus pasar pengadaan tong sampah dimasing-masing rumah/ruko, dan telah diadakan kontrak untuk Tempat Pambuangan Sampah Akhir. Dibeberapa kejurongan lainnya realisasi berkisar 10% sampai 30 %.

- Realisasi program pembinaan dan pelatihan penggunaan hak ulayat dan hgu dari masyarakat hukum adat, hal ini sangat pentingnya bagi masyarakat hukum adat karena banyak dari mereka menuntut hak ulayat bahkan bersebrangan dengan hgu yang telah diterbitkan oleh pemerintah, diharapkan hal ini akan menambah wawasan dan juga pengetahuan masyarakat hukum adat tentang hak dan kewajiban terhadap hak ulayat serta mampu hendaknya melindungi, dan memberikan keamanan yang berkesinambungan bagi mewujudkan pembangunan masyarakat nagari kinali.

- Realisasi Tim Penggerak PKK Nagari Kinali dalam pelaksanaan mensukseskan 10 Program pokok PKK yaitu Pembinaan desa wisata dengan pemberdayaan pekarangan rumah menjadi taman apotik hidup, dari target 80 % desa wisata se kanagarian kinali saat ini teralisasi 50 %, selain itu juga memberikan stimulus bagi kader posyandu di seluruh wilayah nagari kinali.

- Salah satu prestasi yang cukup membanggakan yaitu salah seorang bidan desa/jorong dinagari kinali mampu menjadi juara nasional penilaian bidan jorong/Desa. Hal ini akan menjadikan motivasi khususnya bagi Bidang Jorong/desa, dan juga anak nagari pada umumnya.

- Kelompok Binaan PKK Nagari juga mitra PNM Mandiri Kinali juga telah mampu mengembangkan usaha kecil dan menengah yang merupakan kerajinan rakyat, dan usaha kue baik secara kelompok maupun perorangan.

- Pelaksanaan tinjauan Lapangan (pemeriksaan) khusus untuk pembuatan surat keterangan Tanah Bekas milik adat, hal ini sangat perlu mengingat beberapa permasalahan perdata khususnya pertanahan sering menimbulkan konflik dan juga sengketa. Dan Pemerintah Nagari juga telah mempersiapkan Tim Fasilitasi dan Penyelesaian konflik dalam wilayah nagari kinali.

- Pembinaan dan memotivasi terhadap kelompok seni dan paguyuban kesenian tradisional diwilayah kanagarian kinali
- 3. Permasalahan dan penyelesaiannya

Di beberapa kejurongannya realisasi berkisar 10% sampai 30% dan hal ini dinilai tidak efisien, mengingat ini adalah suatu kebutuhan anak nagari dibidang kesehatan, apabila sehat masyarakatnya maka sehatlah nagarinya, hal ini merupakan kemunduran prestasi yang dulunya gotong royong merupakan suatu budaya ditinggah masyarakat, saat ini telah dipandang perlu untuk meningkatkan Pemberdayaan Semangat Gotong Royong ini sehingga mengkat rumpit sampai dengan anak-anak sekolah, dan juga ditinggah kehidupan masyarakat.

Pada program kegiatan tahun 2014 hal ini akan lebih ditingkatkan melalui rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun 2014.

- 1) Sumber Daya Manusia di Nagari yang masih sangat minim baik secara kualitas dan kuantitasnya. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
- 2) Masih Kurangnya Pengkajian dan Penggalan Potensi Pengelolaan Sumber Daya alam dan Juga Hasil Industri serta limbah industry. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
- 3) Anak Nagari mayoritas tidak memahami akan idologi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Sebagai Landasan Idiel dalam kehidupan bermagari. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
- 4) Banyaknya sengketa tanah baik menyangkut tanah hak ulayat maupun HGU yang dikuasai oleh Perusahaan . (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
- 5) CSR perusahaan tidak jelas dan terarah dalam mengkomodir serta memfasilitasi Pembangunan anak nagari.
- 6) Beberapa Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan yang berakibat kontradiktif ditinggah masyarakat. Sehingga berdampak kepada hasil pembangunan yang lainnya. (Permasalahan urusan Hak asal-usul Nagari)
- 7) Masih minimnya produk hokum nagari tentang pengelolaan sumber daya alam dan hasil industry.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN.

1. Program dan kegiatan

- a. Program Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan tahun 2013.
- b. Program Percepatan Pendaftaran Tanah (BPN).
- c. Program Pemetaan Hutan Lindung. (Kehutanan)
- d. Program Pemasangan patok Tapal Batas Pemda Pasaman Barat dengan Pemda Pasaman.
- e. Program Pemilihan Wali Nagari Kinali. (Kabag. Pem. Nag)

~~PLTMMH~~

~~6/2/14~~

2. Realisasi Pelaksanaan kegiatan

PERDESAAN DAN PERKOTAAN	19.390 stis	
	14.018	Realisasi: <del>289.398.546</del> 280.833.147
	Target 567.448.129	

a. Program Percepatan Pendaftaran Tanah (BPN). th 2014

Telah Terealisasi sejumlah 100 persil.

b. Program Pemetaan Hutan Lindung. (Kehutanan) belum ada keputusan dari Pemda

Kab. Pasbar tentang tapal batas hutan lindung.

c. Program Pemasangan patok Tapal Batas Pemda Pasaman Barat dengan Pemda

Pasaman.

d. Program Pemilihan Wali Nagari Kinahli. (Kabag. Pem. Nag) telah terealisasi dan telah

dilaksanakan Pelantikan Wali Nagari Terpilih.

3. Permasalahan dan penyelesaiannya

a. Tidak jelasnya pemahaman dan juga rekomendasi dari Pemerintah Daerah

Kabupaten tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan juga Hasil industry serta

limbah Industri. (Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten)

b. Perawatan dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah belum maksimal pemberdayaan dan pengelolaannya oleh kelompok

masyarakat. (Permasalahan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten).

c. Belum adanya kesepakatan antara masing-masing pihak tentang tapal batas hutan

lindung.

d. Masih ada perbedaan kesepakatan antara pemerintah Kab. Pasaman dengan

Kab. Pasaman Barat tentang batas wilayah administratif.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 tahun 2011 tentang Pemerintahan

Nagari; Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 2 Tahun 2008

tentang Pemerintahan Nagari; Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor: 188.45/570/BUP.PASBAR/2012 tahun 2012

tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) Pada Kecamatan dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012.4

Keputusan Wali Nagari nomor : 14/S.Keps/WN-Knl/ 2012 tentang penunjukan petugas

pemungutan pajak bumi dan bangunan dan retribusi daerah dalam wilayah nagari kinaili

Surat Keputusan Wali Nagari Kinaili nomor : Tanggal tentang Penunjukan Petugas

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan retribusi daerah.

2. Instansi yang memberikan Pembantuan

Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari

Tim Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan retribusi daerah.

4. Pelaksanaan Kegiatan Yang Diterima

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014

5. Sumber dan jumlah anggaran

Pajak bumi dan bangunan bersumber dari wajib pajak di wilayah nagari kinaili.

Target pajak bumi dan bangunan tahun 2014	556.853.713,-
Realisasi Nominal pajak bumi dan bangunan per 20	287.054.148,-
desember 2014	
Realisasi Setoran pajak bumi dan bangunan per 20	281.144.602,-
desember 2014	
Jumlah STTS	6.659
Prosentase pencapaian Target	51 %
Bagi hasil Pajak yang diterima oleh pemerintah nagari	51.928.164,-
Bagi hasil Retribusi yang diterima oleh pemerintah nagari	9.900.258,-
Realisasi belanja pajak yang diterima oleh pemerintah nagari	21.290.547,-
Belanja insentif	1.940.000,-
Belanja operasional	4.059.106,-

562.898.199  
 280.833.147  
 280.833.147  
 9.673  
 49,9%

**Permasalahan**

a. Objek Pajak yang tercatat di dalam SPT tidak sesuai dengan luas objek yang sebenarnya.

b. Nama Subjek pajak banyak tidak sesuai dengan KTP dan Sertifikat.

c. Nilai Pajak terlalu tinggi banyak masyarakat mengajukan pengurangan jumlah pajak terhutang.

d. Objek Pajak banyak terjadi pemecahan namun di SPT belum dipecah.

e. SPT banyak ganda pada pemecahan.

f. Masih banyak tanah belum terdaftar sebagai objek pajak.

**Penyelesaian**

a. Telah dilaksanakan inventarisasi permasalahan pajak pada tahun 2014

b. Pendaftaran tanah yang belum masuk sebagai objek pajak.

1. Dasar Hukum

- Undang – undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang – undang nomor 27 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.

- Instansi yang memberikan Pembantuan  
Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

- Satuan Pelaksana Kegiatan Nagari
- Petugas Kependudukan dan Pencatatan sipil Nagari.
- Pelaksanaan Kegiatan Yang Diterima
- Pelayanan dibidang Kependudukan (KK, KTP, Datang/Pindah, lahir dan meninggal).
- Sumber dan jumlah anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemdapa Pasaman Barat .

**Permasalahan**

- a. Pengadaan Blanko F-1 dingga F-39. Belum tersedia diadakan oleh capil.
  - b. Di Pemerintahan Nagari belum ada aplikasi kependudukan on-line.
- Penyelesaian
- a. Dibebankan kepada masyarakat.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**BAMUS**  
**BADAN MUSYAWARAH**  
**KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durian Kilangan Telp (0753) 469088 Kode Pos 26367

**SURAT KEPUTUSAN BAMUS NAGARI KINALI**  
**KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
 Nomor : .....03...../BAMUS /III/2014

**TENTANG**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN ( LKPJ ) TAHUN 2013**  
**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BADAN MUSYAWARAH NAGARI KINALI**

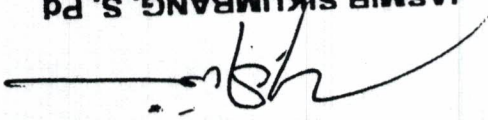
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan Nagari sekaligus penyelenggaraan Program Tahunan Nagari, maka perlu ditetapkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Nagari Kinali Tahun 2013
  - b. bahwa untuk pelaksanaan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari Kinali.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pasaman Barat.
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
  - 4. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan.
  - 5. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Pasaman Barat.
  - 6. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari.
  - 7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat.
  - 8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Umum Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat.
  - 9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Pemerintahan Nagari.
  - 10. Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/206/Bup-2014 tentang Tambahan Penghasilan Tetap Pasbar-2014 tentang Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014.
  - 11. Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/227/Bup-2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Nagari (ADN) pasbar-2014 tentang Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten pasbar-2014 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintahan nagari Dalam kabupaten pasaman Barat Tahun Anggaran 2014.
  - 12. Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/228/Bup-2014 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014.
  - 13. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Fisik Pemberdayaan Pada Alokasi Dana Nagari (ADN) dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011.

- Memperhatikan :
1. Rancangan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Yang di sampaikan Wali Nagari Kinall Pada Tanggal 28 Maret Tahun 2014
  2. Sidang PLENO BAMUS Nagari Kinall tanggal Tanggal 25 Maret 2014
  3. Sidang Paripurna Bamus Nagari Kinall tanggal 28 Maret 2014 Tentang Penetapan APPN Nagari Kinall tahun 2014.

**MEMUTUSKAN**

Menerima dan mengesahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Tahun 2013. Pertama

Keputusan ini beralku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kedua

Ditetapkan di : Durian Kilangan  
 Pada Tanggal : 28 Maret 2014.  
**Badan Musyawarah Nagari Kinall**  
**KETUA**  
  
**JASMIR SIKUMBANG, S.Pd**

- Tembusan disampaikan kepada yth:**
4. Yth, Bapak Bupati Pasaman Barat c.q Pemasnag kab Pasaman Barat di Simpang Empat
  5. Yth, Bapak Camat Kinall di Basung Indah
  6. Wali Nagari Kinall
  7. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**BADAN MUSYAWARAH**  
**BAMUS**



NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durian Kilangan Telip (0753) ..... Kode Pos 26367

BERITA ACARA  
 Nomor : ...../Ql./BAMUS/WN-KNL/III-2014

PERSETUJUAN BERSAMA  
 WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KINALI

TENTANG

PERATURAN NAGARI TENTANG  
 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)  
 TAHUN 2013

Pada Hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun 2014, kami yang bertanda tanda tangan dibawah ini :

1. SYAFRIAL, S.Pd : Wali Nagari. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Nagari Kinali yang beralamat di Aur Badidik yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. JASMIR SIKUMBANG, S.Pd : Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. SIRI AFNI, SH : Wakil Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** Telah membahas dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggung
  2. **PIHAK PERTAMA** Jawaban Nagari Tahun 2013 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**. Jawaban Nagari Tahun 2013 dapat diterima dengan baik LKPJ Nagari Tahun Anggaran
  3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.
- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI KINALI  
 SYAFRIAL, S.Pd

BAMUS NAGARI KINALI  
 WAKIL KETUA

JASMIR SIKUMBANG, S.Pd

BAMUS NAGARI KINALI  
 KETUA

SIRI AFNI, SH